



PEMERINTAH PROVINSI BALI



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP)**

**BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penghubung Provinsi Bali disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk itu disusunlah LKjIP Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2020.

Tujuan dari penyusunan LKjIP adalah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan program kerja yang diselenggarakan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu laporan ini disusun dalam rangka menyampaikan hasil evaluasi dan analisis realisasi kinerja kegiatan dari pelaksanaan kebijakan dan program Badan Penghubung Provinsi Bali serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam Tahun Anggaran 2020.

Penyusunan LKjIP ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Jakarta, 2 Pebruari 2021

KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI BALI



I GUSTI NGURAH WIBAWA.S.Sos, M.Si
PEMBINA
NIP. 19631215 198903 1 015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I	:	PENDAHULUAN	1
		1.1. LATAR BELAKANG	1
		1.2 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	1
BAB II	:	PERJANJIAN KINERJA	4
		2.1 TELAAH VISI MISI PEMERINTAH PROVINSI BALI	4
		2.2 VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI	21
		2.3. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN	22
		2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA	24
		2.5 PENETAPAN KINERJA	25
BAB III	:	AKUNTABILITAS KINERJA	26
		3.1 EVALUASI KINERJA	26
		3.2 ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA	26
		3.3 PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET DENGAN TAHUN SEBELUMNYA	28
		3.4 PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET TAHUN TAHUN 2019 DENGAN TARGET RENSTRA	28
		3.5 ASPEK PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT	29
		3.6 REALISASI ANGGARAN	31
BAB IV	:	PENUTUP	35

LAMPIRAN

1. RENCANA STRATEGIS
2. RENCANA KERJA TAHUNAN 2020
3. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2020
4. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2020
5. INDIKATOR KINERJA UTAMA
6. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020
7. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021

DAFTAR TABEL

TABEL 1 : VISI MISI TUJUAN SASARAN DAN STRATEGI PROVINSI BALI TAHUN 2019 - 2023	4
TABEL 2 : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RPJMD PROVINSI BALI TAHUN 2019 – 2023	13
TABEL 3 : PENETAPAN KINERJA	25
TABEL 4 : CAPAIAN SASARAN	27
TABEL 5 : PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET DENGAN TAHUN SEBELUMNYA	28
TABEL 6 : PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET TAHUN 2019 DENGAN TARGET RENSTRA	29
TABEL 7 : KUANTITAS SDM	29
TABEL 8 : REALISASI PENDAPATAN	32
TABEL 9 : REALISASI BELANJA DAERAH	33
TABEL 10 : REALISASI BELANJA LANGSUNG	33

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*) maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penghubung Provinsi Bali.

Dalam LKjIP Badan Penghubung Provinsi Bali disajikan penjelasan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun indikator kinerja yang dipakai pada pengukuran ini adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome) dari kegiatan Tahun 2020. Sedangkan manfaat (benefit) belum dapat diukur karena memerlukan waktu lama untuk dilakukan penelitian.

Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan belanja langsung sesuai dengan yang tertuang dalam DPA Tahun 2020 secara kuantitatif mencapai angka capaian 96,36% atau secara kualitatif termasuk kategori baik. Pencapaian kinerja ini didorong adanya kerja sama yang baik dari seluruh aparatur yang ada di Badan Penghubung Provinsi Bali, serta adanya kesungguhan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

Jakarta, 2021

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1 Latar Belakang

Sejalan dengan meningkatnya urusan-urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali di Jakarta baik yang meliputi urusan administratif, teknis maupun koordinatif, peran dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Bali di Ibu Kota Negara Jakarta semakin strategis dalam memberikan pelayanan terhadap kelancaran penyelenggaraan urusan-urusan Pemerintah Daerah baik internal maupun eksternal. Untuk mengevaluasi pelaksanaan kinerja yang telah berjalan maka perlu disusun laporan akuntabilitas kinerja.

Asas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan setiap penyelenggaraan Negara harus dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan itu Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2020 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pembuatan LKjIP ini mempunyai manfaat sangat penting disamping sebagai dokumen pelaksanaan perencanaan taktis strategis, juga untuk menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) selama satu tahun anggaran. Sasaran penyusunan LKjIP Badan Penghubung Provinsi Bali berupa pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam DPA Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020.

I. 2 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Badan Penghubung mempunyai tugas untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan

pemerintah pusat. Sesuai dengan Tugas Badan Penghubung secara garis besar memberikan pelayanan sebagai berikut:

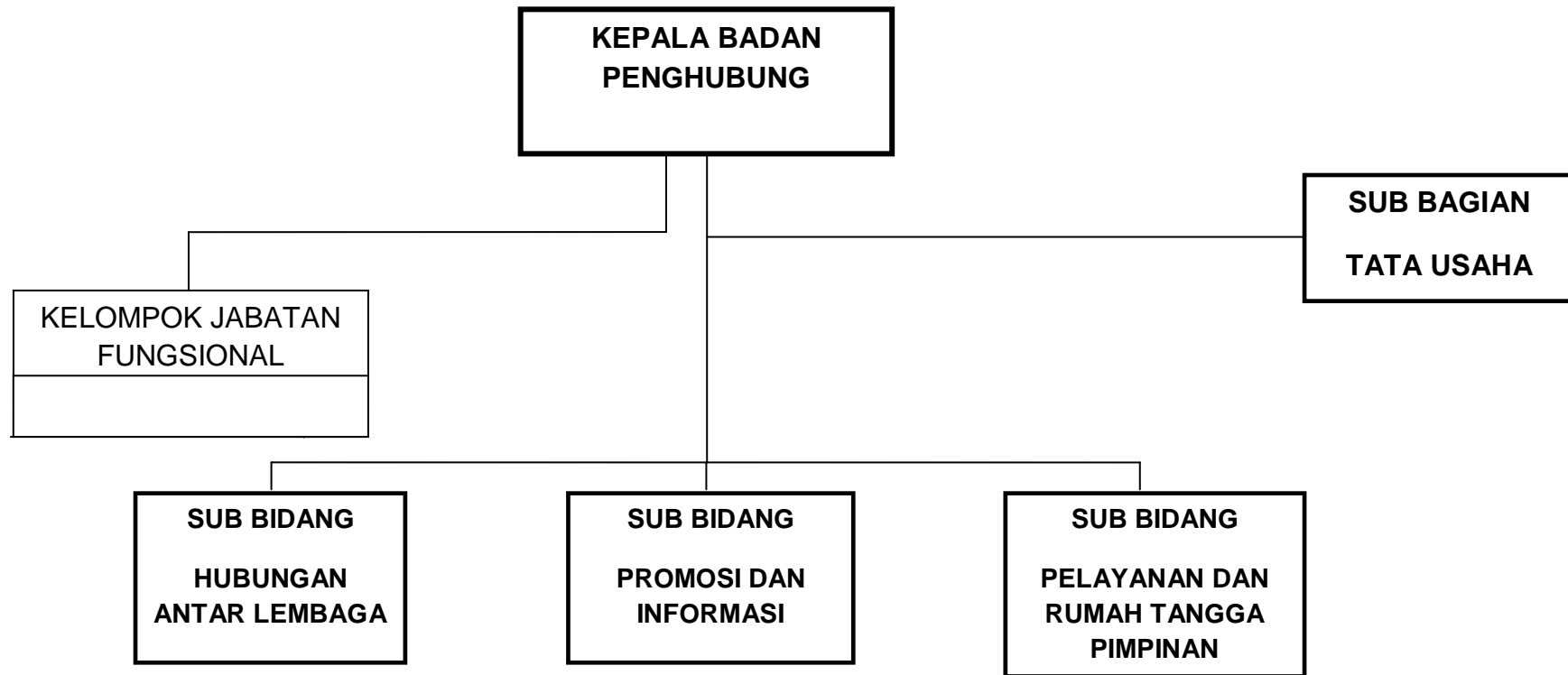
1. Mempermudah koordinasi pemerintah daerah ke pusat;
2. Memberikan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta;
3. Melayani pimpinan daerah yang melaksanakan dinas ke Ibu Kota Jakarta;
4. Sebagai sarana promosi dan informasi seni, budaya dan pariwisata Bali di Jakarta;
5. Menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pendapatan dari Wisma Badan Penghubung Provinsi Bali.

Fungsi, Badan Penghubung Provinsi Bali mempunyai empat fungsi antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis dalam penunjang urusan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;
2. Pengelolaan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas Badan.
3. Pelaksanaan urusan Tata Usaha; dan
4. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Badan Penghubung Provinsi Bali terdiri dari :

1. Kepala
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga
4. Sub Bidang Promosi dan Informasi
5. Sub Bidang Pelayanan dan Rumah Tangga Pimpinan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.



BAB II
PERJANJIAN KINERJA

2.1 TELAAH VISI MISI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BALI

Strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah Provinsi Bali dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2019-2023. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Strategi adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, maka strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam RPJMD Provinsi Bali 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 1

**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Provinsi Bali
Tahun 2019-2023**

**VISI: “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” MELALUI POLA PEMBANGUNAN
SEMESTA BERENCANA**

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD	STRATEGI
MISI 1. MEMASTIKAN TERPENUHINYA KEBUTUHAN PANGAN, SANDANG, DAN PAPAN DALAM JUMLAH DAN KUALITAS YANG MEMADAI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI		
Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas yang layak	1 Meningkatnya Ketahanan pangan bagi Krama Bali	1 Peningkatan kualitas, distribusi dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan

			2	Peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat
	2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin	1	Membentuk yayasan terintegrasi "Yadnya Dharma Krama Bali" (atau sebutan lain yang lebih tepat) untuk penyediaan sandang terjangkau Krame Bali
			2	Peningkatkan pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat masih menggunakan produk sandang Bali
	3	Meningkatnya rasio rumah tangga Krama Bali memiliki rumah layak huni	1	Mempermudah sistem investasi pembangunan rumah murah layak huni Krama Bali
			2	Memberdayakan Lembaga keuangan /perbankan membangun program kredit rumah terjangkau Krama Bali
MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD		STRATEGI	
	4	Terkendalinya Stabilitas Harga Pangan	1	Menguatkan kebijakan pengendalian stabilitas harga pangan
			2	Pengendalian harga pangan terjangkau oleh Krama Bali
MISI 2. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN PANGAN, MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING PERTANIAN, DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI				
Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian	1	Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumberdaya pangan local	1	Peningkatan produktivitas lahan pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan
			2	Sistem subak sebagai tulang punggung irigasi lahan pertanian sawah di Provinsi Bali

			3	Penyediaan bibit unggul pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan yang menjadi potensi pasar lokal dan ekspor
	2	Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali	1	Pembangunan sistem Standar Kualitas Minimal (SKM) produk hasil pertanian tanaman pangan unggulan pasar lokal dan berorientasi ekspor
			2	Pembangunan sumber daya manusia unggul dibidang pertanian dan agro industri dalam arti luas
	3	Meningkatnya kapasitas SDM pertanian Krama Bali	1	Pemberdayaan petani menjadi produsen industri pangan olahan hasil pertanian
MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD		STRATEGI	
MISI 3. MENGEMBANGKAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG TERJANGKAU, MERATA, ADIL DAN BERKUALITAS SERTA DIDUKUNG DENGAN PENGEMBANGAN SISTEM DAN DATA BASE RIWAYAT KESEHATAN KRAMA BALI BERBASIS KECAMATAN.				
Meningkatnya derajat kesehatan Krama Bali	1	Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh Krama Bali	1	Pendataan riwayat dan pelayanan kesehatan Krama Bali
	2	Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan Krama Bali		
	3	Meningkatnya peserta dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat	2	Pemberdayaan komunitas formal dan Informal Krama Bali sebagai mensosialisasikan dan sebagai peserta jaminan kesehatan Krama Bali Sejahtera (KBS)
MISI 4. MEMASTIKAN TERSEDIANYA PELAYANAN PENDIDIKAN YANG TERJANGKAU, MERATA, ADIL, DAN BERKUALITAS SERTA				

MELAKSANAKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN				
Terwujudnya wajib belajar 12 tahun yang berkualitas	1	Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas	1	Penyelenggaraan proses pelayanan pendidikan yang berkualitas
	2	Terwujudnya wajib belajar 12 tahun	2	Pendidikan gratis 12 tahun
MISI 5. MENGEMBANGKAN SISTEM PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH BERBASIS KEAGAMAAN HINDU DALAM BENTUK PASRAMAN DI DESA PEKRAMAN/DESA ADAT				
Terwujudnya karakter Krama Bali unggul sebagai individu dan sosial yang berbasis kearifan lokal	Meningkatnya pelayanan pendidikan berbasis Keagamaan pada tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah dalam bentuk pasraman	Mendorong pemerintah pusat pendidikan berbasis Agama Hindu tingkat sekolah dasar dan Menengah masuk dalam sistem pendidikan Nasional		
MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD	STRATEGI		
MISI 6. MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING TINGGI YAITU BERKUALITAS DAN BERINTEGRITAS: BERMUTU, PROFESIONAL DAN BERMORAL SERTA MEMILIKI JATI DIRI YANG KOKOH YANG DIKEMBANGKAN BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL KRAMA BALI				
Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali sebagai Enterpreneur		
MISI 7. MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL SECARA KONPREHENSIF DAN TERINTEGRASI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI SEJAK MULAI KELAHIRAN, TUMBUH DAN BERKEMBANG SAMPAI AKHIR MASA KEHIDUPANNYA				
Terwujudnya kesejahteraan sosial Krama Bali	Meningkatnya kualitas Pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak Krama Bali	Pemerintah daerah bersama masyarakat mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki sebagai bagian dari jaminan sosial Krama Bali		
MISI 8. MENGHASILKAN TENAGA KERJA YANG KOMPETEN, PRODUKTIF, BERKUALITAS DAN MEMILIKI DAYA SAING TINGGI SERTA				

MEMPERLUAS AKSES KESEMPATAN KERJA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI			
Terwujudnya tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing	1	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali mengisi pasar tenaga kerja domestik dan global
	2	Meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan diluar negeri	
MISI 9. MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA YANG KOMPERHENSIF, MUDAH DIJANGKAU, BERMUTU, DAN TERINTEGRASI BAGI KRAMA BALI YANG BEKERJA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI			
Terwujudnya jaminan ketenagakerjaan yang terjangkau, bermutu dan berkelanjutan	Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan		Peningkatan cakupan layanan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenaga Kerjaan
MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD		STRATEGI
MISI 10. MEMAJUKAN KEBUDAYAAN BALI MELALUI PENINGKATAN PELINDUNGAN, PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN NILAI-NILAI ADAT, AGAMA, TRADISI, SENI, DAN BUDAYA KRAMA BALI			
Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali	Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali.	1	Melembagakan dan menginternalisasikan nilai nilai tradisi, seni, dan budaya melalui system pendidikan formal, non-formal dan informal
		2	Memelihara, merevitalisasi, dan mengembangkan tradisi, seni, sastra dan budaya masyarakat Bali
		3	Penguatan kedudukan, peran, fungsi, tugas dan wewenang Majelis Kebudayaan
		4	Konservasi dan restorasi peninggalan benda cagar budaya
MISI 11. MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI SECARA			

SAKALA DAN NISKALA BERDASARKAN NILAI-NILAI FILSAFAT SAD KERTIH YAITU ATMA KERTIH, DANU KERTIH, WANA KERTIH, SEGARA KERTIH, JANA KERTIH, DAN JAGAT KERTIH				
Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Meningkatnya kualitas tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	1	Merancang kegiatan untuk peningkatan infrastruktur di wilayah kawasan suci Pura	
		2	Memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama.	
MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD	STRATEGI		
MISI 12. MEMPERKUAT KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DESA PAKRAMAN/DESA ADAT DAN SUBAK DALAM MENYELENGGARAKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG MELIPUTI PARAHYANGAN, PAWONGAN, DAN PALEMAHAN				
Terwujudnya Penguatan Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali berdasarkan Sad Kerthi	Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak		Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak	
MISI 13. MENGEMBANGKAN DESTINASI DAN PRODUK PARIWISATA BARU BERBASIS BUDAYA DAN BERPIHAK KEPADA RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR KABUPATEN/KOTA SE-BALI				
Berkembangnya destinasi dan produk pariwisata budaya berbasis komunitas	1	Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas	1	Event, atraksi, pertunjukan kesenian, pameran kesenian dan kegiatan adat dan budaya sebagai objek wisata
	2	Berkembangnya produk pariwisata kreatif dan inovatif berbasis budaya di kabupaten/kota Provinsi Bali	2	Kebudayaan kabupaten /kota yang beranekaragam Provinsi Bali sebagai produk pariwisata yang terintegrasi
MISI 14. MENINGKATKAN PROMOSI PARIWISATA BALI DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI SECARA BERSINERGI ANTAR KABUPATEN/KOTA SE-BALI DENGAN MENGEMBANGKAN INOVASI DAN KREATIFITAS BARU				
Meningkatnya pasar pariwisata	Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan		Mengkoordinasikan pelaku industri wisata melakukan	

Bali	global			bauran promosi (promotion mix) untuk meningkatkan pangsa pasar industri pariwisata Bali
MISI 15. MENINGKATKAN STANDAR KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN SECARA KONPREHENSIF				
Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan	1	Meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan	1	Penyediaan sarana prasarana yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) pariwisata pada setiap destinasi dan produk pariwisata
	2	Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata	1	Peningkatan kualitas SDM Pariwisata melalui pelatihan-pelatihan sesuai pasar kerja
MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD		STRATEGI	
			2	Memperkuat dukungan regulasi perlindungan tenaga kerja lokal dan mengembangkan kerjasama ketenagakerjaan di sektor pariwisata
MISI 16. MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN PUSAT-PUSAT PEREKONOMIAN BARU SESUAI DENGAN POTENSI KABUPATEN/KOTA DI BALI DENGAN MEMBERDAYAKAN SUMBER DAYA LOKAL UNTUK Mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas				
Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali	1	Meningkatnya Investasi yang lebih merata di wilayah Bali	1	Mengembangkan Bali Timur dan Bali Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Bali
	2	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal	1	Mengembangkan Pertokoan Modern berbasis ekonomi lokal
MISI 17. MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BERBASIS BUDAYA (BRANDING BALI) UNTUK MEMPERKUAT PEREKONOMIAN KRAMA BALI				

Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali	1	Meningkatnya kualitas produk IKM branding Bali berorientasi Ekspor	1	Mengenalkan, mempromosikan / mengkampanyekan seluruh produk Bali dengan brand Bali di pasar lokal dan ekspor
	2	Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah Krama Bali	2	Pengembangan usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi menghasilkan produk untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor
MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD		STRATEGI	
			3	Mengembangkan promosi dan pemasaran produk usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor
MISI 18. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (DARAT, LAUT DAN UDARA) SECARA TERINTEGRASI SERTA KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH UNTUK Mendukung PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN SERTA AKSES DAN MUTU PELAYANAN PUBLIK DI BALI				
Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi		1	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi Bali
			2	Pembangunan Infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan public
MISI 19. MENGEMBANGKAN SISTEM KEAMANAN TERPADU YANG				

DITOPANG DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA SERTA SARANA PRASARANA YANG MEMADAI UNTUK MENJAGA KEAMANAN DAERAH DAN KRAMA BALI SERTA KEAMANAN PARA WISATAWAN				
Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan	1	Meningkatnya rasa aman dan nyaman Krama Bali dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.	1	Pemberdayaan Krama Bali dan aparat pemerintah daerah sebagai keamanan lingkungan pemukiman
	2	Meningkatnya rasa aman dan nyaman wisatawan	2	Peningkatan koordinasi antara aparat pemerintah dan Lembaga kepolisian untuk menciptakan rasa aman wisatawan berwisata

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD	STRATEGI		
MISI 20. MEWUJUDKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN DENGAN MEMPERKUAT BUDAYA HUKUM, BUDAYA POLITIK DAN KESETARAAN GENDER DENGAN MEMPERHATIKAN NILAI-NILAI BUDAYA BALI				
Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	Meningkatnya peran serta Krama Bali dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	1	Memperkuat masyarakat Madani dalam sosial kemasyarakatan Krama Bali	
		2	Kesetaraan Gender dalam nilai-nilai tata kehidupan Krama Bali	
MISI 21. MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI, MENATA WILAYAH DAN LINGKUNGAN YANG BERSIH, HIJAU DAN INDAH				
Terwujudnya Tata Kehidupan Krama Bali yang harmonis	Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan Krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan	1	Pemanfaatan ruang mengacu kepada tataruang yang harmonis dengan tata kehidupan Krama Bali	
Terwujudnya wilayah dan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan	2	Membangun lingkungan yang sehat dan nyaman	
MISI 22. MENGEMBANGKAN SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF EFISIEN, TERBUKA, TRANSPARAN, AKUNTABEL				

DAN BERSIH SERTA MENINGKATKAN PELAYAN PUBLIK TERPADU YANG CEPAT, PASTI DAN MURAH				
Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik	Meningkatnya kualitas pelayanan sektor public		1	Membangun sarana prasarana pelayanan publik yang terintegrasi antar instansi lembaga pemerintah daerah
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	1	Membangun sistem tata kelola yang terintegrasi
	2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pengembangan sumber pendapatan lain-lain

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan nantinya juga terkait dengan horizon waktu, sehingga menjadi jelas kapan arah kebijakan tersebut dilaksanakan. Arah Kebijakan Provinsi Bali Tahun 2019-2023 sebagai berikut.

Tabel. 2

**Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Bali
Tahun 2019-2023**

Strategi		Arah Kebijakan
1	Peningkatan kualitas, distribusi dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan	Ketersediaan hasil pertanian dalam arti luas, peternakan dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan "Pangan Pokok Krama Bali"
2	Peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat	Meningkatkan keamanan dan konsumsi pangan bergizi
3	Pengendalian harga pangan terjangkau oleh Krama Bali	Stabilitas harga pangan Krama Bali
4	Membentuk yayasan terintegrasi "Yadnya Dharma Krama Bali" (atau sebutan lain yang lebih	"Yadnya Dharma Bali" (atau sebutan lain yang lebih tepat) menjadi jaringan pusat penyediaan sandang

	tepat) untuk penyediaan sandang terjangkau Krame Bali	gratis atau murah dan layak pakai Krama Bali di kab/kota Provinsi Bali	
5	Peningkatan pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin menggunakan produk sandang	Peningkatan pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin	
6	Mempermudah sistem investasi pembangunan rumah murah layak huni Krama Bali	Meningkatkan kepemilikan rumah bagi rumah tangga Krama Bali	
7	Memberdayakan Lembaga keuangan /perbankan membangun program kredit rumah terjangkau Krama Bali	Menjadikan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai salah satu bank/sumber pendanaan bunga rendah untuk kredit rumah layak huni Krama Bali golongan ekonomi lemah (atau kelompok tertentu yang lebih tepat)	
Strategi		Arah Kebijakan	
8	Peningkatan produktivitas lahan pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan	1	Pengenalan dan penerapan teknologi kepada petani pelaku usaha tanaman pangan dalam arti luas, perikanan dan peternakan untuk meningkatkan produksi
		2	Modernisasi sistem tanaman pertanian hortikultura untuk meningkatkan hasil tanam serta menghasilkan keluaran yang berkualitas dan bernilai tambah tinggi
9	Sistem subak sebagai tulang punggung irigasi lahan pertanian sawah Provinsi Bali	Pemberdayaan dan pembinaan komunitas/lembaga/organisasi Subak untuk memenuhi kebutuhan saluran irigasi untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian sawah kab/kota Provinsi Bali	
10	Penyediaan bibit unggul pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan yang menjadi potensi pasar lokal dan ekspor	1	Bekerjasama dengan lembaga riset pemerintah/swasta atau perguruan tinggi untuk menghasilkan bibit unggul sesuai dengan kebutuhan pasar lokal dan ekspor

		2	Pelindungan lahan pertanian pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan berkelanjutan
11	Pengembangan sistem Standar Kualitas Minimal (SKM) produk hasil pertanian tanaman pangan unggulan pasar lokal dan berorientasi ekspor	Pembinaan dan pengendalian petani untuk menghasilkan produk hasil pertaniannya sesuai dengan Standar Kualitas Minimal (SKM) untuk memenuhi kualitas pasar lokal dan ekspor	
12	Pembangunan sumber daya manusia unggul dibidang pertanian dan agro industri dalam arti luas	Pengembangan kompetensi Krama Bali dibidang pertanian tanaman pangan, agro industri, pascapanen sebagai duta pengembangan masyarakat pertanian yang unggul dan berkelanjutan	
13	Pemberdayaan petani menjadi produsen industri pangan olahan hasil pertanian	1	Meningkatkan kemampuan petani dengan mengenalkan industri pangan olahan hasil pertanian
		2	Membantu meningkatkan pangsa pasar lokal dan eksport produk hasil pertanian dalam arti luas
		3	Menyediakan sumber pendanaan murah untuk pengembangan usaha tani
Strategi		Arah Kebijakan	
14	Pendataan riwayat dan pelayanan kesehatan Krama Bali	Mengembangkan sistem data base riwayat dan pelayanani kesehatan terintegrasi kabupaten/kota Provinsi Bali berbasis teknologi informasi Krama Bali	
15	Pemberdayaan komunitas formal dan Informal Krama Bali sebagai mensosialisasikan dan sebagai peserta jaminan kesehatan Krama Bali Sejahtera (KBS)	Membangun sistem data base peserta jaminan kesehatan (BPJS) Kesehatan Krama Bali pendataan Krama Bali terintegrasi riwayat dan pelayanani kesehatan terintegrasi kabupaten/kota Provinsi Bali berbasis teknologi informasi Krama Bali	
16	Menyelenggarakan proses pelayanan pendidikan yang berkualitas	1	Meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Provinsi Bali diatas Nasional
		2	Meningkatkan kemampuan dan kualitas tenaga pendidik
17	Pendidikan gratis 12 tahun	Memberikan beasiswa bagi kelompok keluarga Prasejahtera, Sejahtera-I dan	

		Sejahtera -II untuk bersekolah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja Provinsi Bali	
18	Mendorong pemerintah pusat pendidikan berbasis Agama Hindu tingkat sekolah dasar dan Menengah masuk dalam sistem pendidikan Nasional	Membangun sistem manajemen pendidikan berbasis Agama Hindu untuk diajukan ke pemerintah pusat	
19	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali sebagai Entrepreneur	1	Membangun sarana prasarana untuk menghasilkan tenaga kerja Krama Bali berjiwa wirausahawan
		2	Membangun hubungan kerjasama pemerintah dengan dunia usaha untuk menghasilkan wirausaha-2 baru Krama Bali
		3	Membangun hubungan kerjasama antara Government To Government (G To G) dan pemerintah dengan swasta penempatan/ penyaluran dan perlindungan Tenaga Kerja Kerama Bali di luar negeri
20	Pemerintah daerah bersama masyarakat mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki sebagai bagian dari jaminan sosial Krama Bali	1	Mengembangkan Jaminan Sosial Kesehatan/ BPJS Kesehatan Provinsi Bali
		2	Memberdayakan sistem gotong royong sosial kemasyarakatan yang telah ada dan hidup pada Krama Bali
Strategi		Arah Kebijakan	
		3	Meningkatkan jaminan bantuan sosial kepada Krama Bali golongan keluarga miskin (Gakin)
21	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali mengisi pasar tenaga kerja domestik dan global	Membangun sistem, sarana prasarana untuk menghasilkan tenaga kerja Krama Bali unggul dan meningkatkan kesempatan kerja	
22	Meningkatkan cakupan layanan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenaga Kerjaan	1	Meningkatkan cakupan jaminan kesehatan tenaga kerja Krama Bali
		2	Membangun hubungan kerjasama antara Government To Government (G To G) dan pemerintah dengan swasta

			pengendalian jaminan sosial ketenagakerjaan Krama Bali bekerja diluar negeri
23	Melembagakan dan menginternalisasi nilai nilai tradisi, seni, dan budaya melalui system pendidikan formal, non-formal dan informal		Menjadikan tradisi, seni dan budaya sebagai tata cara kehidupan Krama Bali guna memperkokoh jati diri Krama Bali dan memperkuat integritas moral Krama Bali
24	Memelihara, merevitalisasi, dan mengembangkan tradisi, seni, sastra dan budaya masyarakat Bali		Pengembangan tata kehidupan krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi
25	Penguatan kedudukan, peran, fungsi, tugas dan wewenang Majelis Kebudayaan		Memberikan apresiasi dan fasilitasi kepada lembaga, pelaku, dan karya Seni, Sastra, dan Budaya
26	Konservasi dan restorasi peninggalan benda cagar budaya		Melindungi peninggalan benda cagar budaya secara holistik
27	Merancang kegiatan untuk peningkatan infrastruktur di wilayah kawasan suci Pura	1	Meningkatkan kualitas fasilitas keagamaan
		2	Memperhatikan kesejahteraan dan fasilitas kehidupan kepada para Sulinggih/Pemangku
		3	Meningkatkan sradha dan bhakti umat Hindu
		4	Pengamanan dan perlindungan terhadap Pura dan Pratima Pura
		5	Perlindungan terhadap aset Pura (Pelaba Pura) termasuk sertifikasi dengan Peraturan Bupati/Peraturan lainnya
Strategi		Arah Kebijakan	
		6	Melindungi simbol – simbol keagamaan yang sakral (Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota). (REGULASI) (Rancangan Pergub tentang simbul simbul keagamaan)
28	Memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama		Meningkatkan toleransi hidup beragama
29	Penguatan kedudukan, tugas da fungsi desa adat dan subak	1	Memperkuat Desa Adat dalam melaksankana fungsi Parahyangan, Palemahan, dan

			Pawongan, serta awig-awig dan pararem, sehingga Desa Adat akan berdiri kokoh dan bisa berjalan secara paralel dengan Desa
		2	Memberdayakan Desa Adat sebagai tempat Pendidikan berbasis keagamaan Hindu (khususnya pendidikan non-formal)
		3	Memberdayakan Desa Adat sebagai tempat Pelestarian dan pembinaan seni, budaya, dan kearifan lokal bagi Krama Bali termasuk sekehe teruna-teruni (generasi muda)
		4	Memberdayakan Desa Adat sebagai tempat Mengembangkan perekonomian rakyat (Pasar Adat, LPD, BUM Desa Adat, Toko Moderen
		5	Memperkuat dan memberdayakan organisasi sekaha teruna dan pecalang di Desa Adat sampai ke tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi
		6	Memperkuat Desa Adat sebagai tempat Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali sesuai nilai-nilai Sad Kerthi
		7	Menjadikan wantilan Desa Adat sebagai wahana Balinese Culture Meeting Point yang dilengkapi dengan Wifi gratis dan fasilitas pendukung seni budaya lainnya
		8	Memelihara, merevitalisasi dan memperkuat Hukum Adat/Awig/Perarem di Desa Adat
		9	Memberi perlindungan terhadap aset Desa (milik/Druwe Desa)
Strategi		Arah Kebijakan	
		10	Memelihara, merevitalisasi dan mengembangkan adat istiadat dan tradisi masyarakat Bali
30	Event, atraksi, pertunjukan kesenian, pameran kesenian dan kegiatan adat dan budaya	Memberdayakan Event, atraksi, pertunjukan kesenian, pameran kesenian dan kegiatan adat dan	

	sebagai objek wisata	budaya mempunyai nilai ekonomis	
31	Kebudayaan kabupaten /kota yang beranekaragam Provinsi Bali sebagai produk pariwisata yang terintegrasi	Pengembangan sarana prasarana budaya, adat istiadat sesuai dengan potensi daerah	
32	Mengkoordinasikan pelaku industri wisata melakukan bauran promosi (promotion mix) untuk meningkatkan pangsa pasar industri pariwisata Bali	Mempromosikan distinasisi wisata dan produk pariwisata baru provinsi Bali	
33	Penyediaan sarana prasarana yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) pariwisata pada setiap destinasi dan produk pariwisata	Pengendalian pelaku usaha industri pariwisata melalui pemenuhan Standar minimal (SPM) Pariwisata yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Bali	
34	Peningkatan kualitas SDM pariwisata melalui sesuai pasar kerja	1	Melakukan moratorium mengalihkan investasi dalam jumlah tertentu (atau size/jenis bisnis tertentu) ke Bali Timur dan Bali Utara
		2	Kemudahan perijinan usaha untuk investasi di Bali Timur dan Utara (size/jenis bisnis tertentu) ke Bali Timur dan Bali Utara
		3	Pengembangan sumberdaya daerah dengan pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta
35	Memperkuat dukungan regulasi perlindungan tenaga kerja lokal dan mengembangkan kerjasama ketenaga kerjaan disektor pariwisata	Membangun sarana prasarana untuk terbangunnya persepsi brand Bali untuk seluruh produk hasil produksi Provinsi Bali	
Strategi		Arah Kebijakan	
36	Pengembangan usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi menghasilkan produk untuk meningkatkan pangsa pasar	1	Melakukan pembinaan dan pendampingan usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi menghasilkan produk yang unik dan berbasis budaya Bali yang

	lokal dan ekspor		berdaya saing tinggi
		2	Membangun sumber modal kerja mudah dan murah bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi
		3	Membangun sarana prasarana spesifikasi khusus/ spesifik untuk meningkatkan daya saing usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi
37	Mengembangkan promosi dan pemasaran produk usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor		Fasilitasi infrastruktur untuk pengembangan Koperasi, industri kecil menengah (IKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM)
38	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi Bali		Pembangunan infrastruktur darat , laut dan udara yang terinteragi dan konektivitas antara kabupaten /kota Provinsi Bali dengan wilayah lain di Indonesia
39	Pembangunan Infrastuktur untuk meningkatkan pelayanan publik		Pembangunan infrastruktur untuk konektivitas antar kab/kota di Provinsi Bali
40	Pemberdayaan Krama Bali dan aparaturn pemerintah daerah sebagai keamanan lingkungan pemukiman		Meningkatkan sistem infrastruktur keamanan lingkungan Krama Bali
41	Peningkatan koordinasi antara aparaturn pemerintah dan Lembaga kepolisian untuk menciptakan rasa aman wisatawan berwisata		Meningkatkan sistem infrastruktur keamanan Wisatawan
Strategi		Arah Kebijakan	
42	Memperkuat masyarakat Madani dalam sosial kemasyarakatan Krama Bali		Masyarakat Madani menjadi tulang punggung kehidupan demokratis, perlakuan hukum yang adil, dan dalam menjalankan hak-hak konstitusi kehidupan Krama Bali

43	Kesetaraan Gender dalam nilai-nilai tata kehidupan Krama Bali	Menyelaraskan kesetaraan Gender dalam nilai-nilai budaya Bali dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI	
44	Pemanfaatan ruang mengacu kepada tataruang yang harmonis dengan tata kehidupan Krama Bali	1	Pembangunan infrastruktur, sarana prasarana untuk kehidupan Krama Bali dan pengembangan ekonomi daerah berprdoman pada tata ruang yang telah ditetapkan
		2	Menjadikan Wilayah Bali Timur dan Bali Utara Sebagai pusat pengembangan dan pertumbuhan ekonomi Baru
45	Membangun lingkungan yang sehat dan nyaman	Mengendalikan perilaku Krama Bali dan pengunjung untuk menjaga lingkungan hidup pulau Bali	
46	Membangun sarana prasarana pelayanan publik yang terintegrasi antar instansi Lembaga Pemerintah Daerah	Pelayanan publik terselenggara dengan cara-cara yang efisien, efektif dan transparan	
47	Membangun sistem tata kelola yang terintegrasi	1	Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan kompetensinya
		2	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sumber daya pemerintah daerah

2.2 VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

Menunjuk pada Visi Misi dan Renstra Provinsi Bali maka terbentuklah Visi Misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan target yang ingin dicapai Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2019-2023.

2.2.1 Visi

Visi Badan Penghubung Provinsi Bali adalah “Terwujudnya kelancaran urusan pemerintahan dan pembangunan daerah Bali di Ibu Kota Jakarta”.

2.2.2 Misi

Misi Badan Penghubung Provinsi Bali adalah :

1. Meningkatkan kelancaran koordinasi hubungan antar lembaga

2. Mewujudkan pelayanan yang profesional untuk peningkatan pendapatan melalui wisma Badan Penghubung Provinsi Bali
3. Mewujudkan promosi dan informasi di bidang ekonomi, sosial budaya, seni dan pariwisata di Jakarta
4. Meningkatkan pengembangan dan pembinaan seni, adat dan budaya Bali di Jakarta

2.2.3 Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan Badan Penghubung Provinsi Bali adalah :

Terwujudnya pelayanan yang profesional di Badan Penghubung Provinsi Bali.

Pelayanan yang dimaksud adalah :

1. Pelayanan koordinasi hubungan antar lembaga antara Pemerintah Provinsi Kab/kota ke Pemerintah Pusat melalui Badan Penghubung Provinsi Bali
2. Pelayanan profesional bagi tamu wisma Badan Penghubung Provinsi Bali
3. Pelayanan promosi seni budaya untuk pengunjung Anjungan Bali TMII
4. Pelayanan pembinaan seni, adat dan budaya Bali di Jakarta

2.2.4 Sasaran

Adapun yang menjadi sasaran Badan Penghubung Provinsi Bali adalah :

Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali dengan indikator kinerja berupa indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali.

2.3 CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas rencana kinerja Badan Penghubung Provinsi Bali dikembangkan kedalam kebijakan, program dan kegiatan.

1. Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat taktis strategis yang diambil dan ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Penghubung Provinsi Bali, antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan koordinasi antar lembaga/kementerian/non kementerian dari daerah ke pusat yang terselesaikan dengan baik
- b. Meningkatkan frekuensi promosi informasi tentang kebudayaan dan pariwisata Bali di Jakarta
- c. Meningkatkan frekuensi pembinaan masyarakat Bali di Jakarta
- d. Meningkatkan pelayanan yang optimal kepada tamu wisma Badan Penghubung Provinsi Bali.

2. Program

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dilaksanakan 2 program antara lain:

- a. Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja
- b. Program Pelayanan Komunikasi dan Penyebarluasan Informasi Potensi Daerah

3. Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan kedua program di atas ada 21 kegiatan yang dilakukan, sebagai berikut:

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik
- c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- d. Penyediaan alat tulis kantor
- e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- h. Penyediaan makanan dan minuman
- i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- j. Upacara keagamaan
- k. Penyusunan Perencanaan dan pelaporan capaian kinerja
- l. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- m. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
- n. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- o. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
- p. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- q. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
- r. Penyediaan bahan logistik kantor
- s. Pagelaran seni budaya
- t. Pelestarian dan pengembangan adat dan budaya
- u. Penyediaan Barang/Jasa dan kegiatan rutin pimpinan Daerah

2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah/ Satuan Kerja Perangkat Daerah.

IKU Badan Penghubung Provinsi Bali adalah :

Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali, pelayanan yang dimaksud adalah :

- 1 Pelayanan koordinasi hubungan antar lembaga
- 2 Pelayanan pembinaan umat/masyarakat Bali di Jakarta melalui kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya
- 3 Pelayanan promosi dan informasi melalui berbagai pagelaran seni budaya di Anjungan Daerah Bali di Jakarta

- 4 Pelayanan terhadap pimpinan (protokoler) dan tamu wisma di Badan Penghubung Provinsi Bali

2.5 PENETAPAN KINERJA

Penetapan kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Adapun Penetapan Kinerja Tahun 2020 pada Badan Penghubung Provinsi Bali sebagai berikut :

TABEL 3
PENETAPAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	75

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 EVALUASI KINERJA

Untuk melihat sampai sejauh mana pencapaian pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dilakukan metode pengukuran kinerja kegiatan. Atas dasar dari hasil-hasil yang diperoleh dari pengukuran kinerja kegiatan, selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja sasaran, melalui indikator-indikator kinerja pencapaian sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja.

Pengukuran kinerja merupakan perbandingan antara target kinerja (*performance plan*) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (*performance result*). Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja (*performance gap*) yang kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab ketidakberhasilan, dan selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

3.2 ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 tidak hanya berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan dari perolehan masing-masing indikator-indikator kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam, serta sejauh mana realisasi sasaran dalam Renstra Badan Penghubung Provinsi Bali dapat terwujud.

TABEL 4
CAPAIAN SASARAN

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali

Indikator Kinerja Utama	Target Renstra	Realisasi s.d Tahun 2020	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali :	90	85.96	75	85.96	114,60%
1. Indeks kepuasan penerima pelayanan Hubungan Antar Lembaga		92.02			
2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pembinaan masyarakat Bali di Jakarta melalui Badan Penghubung		86.58			
3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan promosi dan informasi di Anjungan Daerah Bali di Jakarta		88.50			
4. Indeks kepuasan pelanggan tamu wisma di Badan Penghubung Provinsi Bali		76.76			

Berdasarkan data di atas capaian/realisasi indikator kinerja Tahun 2020 untuk sasaran strategis dapat dicapai dengan baik bahkan melampaui target yaitu dengan persentase capaian 114,60%. Dengan target nilai IKM 75 di Tahun 2020 ternyata penilaian IKM rata-rata pelayanan di Badan Penghubung sudah mencapai 85.96. Nilai IKM paling tinggi dicapai dari pelayanan Hubungan Antar Lembaga dan terendah dari pelayanan wisma Badan Penghubung Provisi Bali. Perhitungan IKM sudah sesuai dengan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang PEDOMAN PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK.

3.3 PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Perbandingan dengan tahun sebelumnya yaitu Tahun 2019 merupakan tahun awal Renstra 2019 – 2023.

TABEL 5.

PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian Tahun 2019	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2020
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	70	83,92	119,80	75	85.96	114.60%

3.4 PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET TAHUN 2020 DENGAN TARGET RENSTRA

Untuk perbandingan capaian sasaran strategis tahun berjalan Renstra dalam hal ini yaitu tahun 2019 dengan target Renstra 2019-2023 dapat kita lihat pada tabel berikut :

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali

TABEL 6

PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET TAHUN 2020 DENGAN TARGET RENSTRA

Indikator Kinerja Utama	Target Renstra	Realisasi s.d Tahun 2020	Persentase capaian akhir tahun Renstra
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	90	85.96	95.50%

3.5 ASPEK PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT

Aspek Pendukung :

1. Kuantitas (jumlah) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan tugas, dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Bali sejumlah 44 orang dengan rincian :

TABEL 7
KUANTITAS SDM

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Berdasarkan Pangkat/Golongan:	
	- Pembina	1 orang
	- Penata Tk.I/ III d	3 orang
	- Penata/ III c	3 orang
	- Penata Muda Tk.I/ III b	2 orang
	- Penata Muda/ III a	2 orang
	- Pengatur Tk I/ III d	1 orang
	- Pengatur/ III c	4 orang
	- Pengatur Muda Tk.I/ III b	2 orang
	- Juru Tk. I	2 orang
2.	Berdasarkan Eselon:	
	Eselon III a	1 orang
	Eselon IV a	3 orang
3.	Tenaga Kontrak	24 orang

2. Sarana dan prasarana

Untuk menunjang pencapaian target sasaran strategis Badan Penghubung Provinsi Bali telah mempunyai sarana dan prasarana pendukung yang berada di wisma Badan Penghubung Provinsi Bali di Cikini maupun di Anjungan Daerah Bali TMII sebagai berikut :

1. Gedung wisma dengan kapasitas 14 kamar
2. Ruang Kantor di Cikini dan Anjungan Daerah Bali TMII
3. Aula/auditorium di Cikini
4. Kendaraan roda 4 (mobil) sejumlah 11
5. Kendaraan roda 2 (motor) sejumlah 2
6. Wantilan di anjungan Bali untuk pementasan seni
7. Panggung terbuka untuk pementasan seni
8. Brosur dan pamflet promosi dan informasi kebudayaan Bali

Namun selain aspek pendukung diatas juga terdapat beberapa aspek penghambat dalam pencapaian target sasaran strategis, yaitu :

1. Kualitas (kompetensi) Sumber Daya Manusia

Dari ke-20 PNS yang terdapat di Badan Penghubung Provinsi Bali, 4 (empat) orang diantaranya bekerja di anjungan Bali TMII dibawah Sub Bidang Promosi dan Informasi, 3 (tiga) orang dibawah Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga, 5 (lima) di bawah Sub Bidang Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan dan 7 (tujuh) PNS bertugas di Subbag Tata Usaha. Kualifikasi pendidikan dari PNS di Badan Penghubung Provinsi Bali sangat jauh dari harapan dan kebutuhan analisis jabatan dan beban kerja dalam rangka pencapaian sasaran strategis. Padahal sangat banyak keahlian yang dibutuhkan dalam mewujudkan sasaran yang telah ditentukan OPD. Dari ke-20 PNS di Tahun 2020 hanya 6 (enam) orang yang berpendidikan sampai dengan S-2, 3 (tiga) orang berpendidikan S1 dan yang lainnya dengan tingkat pendidikan setara SMA dan belum meningkatkan kapasitasnya demi kualitas pribadi untuk menunjang kualitas SDM di Badan Penghubung Provinsi Bali. Sesuai dengan Analisis Jabatan diperlukan setidaknya 33 PNS dengan kualifikasi tertentu di Badan Penghubung Provinsi Bali (sesuai peta jabatan terlampir).

2. Anggaran

Secara keseluruhan anggaran sangat berpengaruh terhadap capaian sasaran strategis. Di Tahun 2020 demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ada beberapa hal yang kami laksanakan terkait anggaran yaitu :

1. Menganggarkan pembangunan wisma Badan Penghubung Provinsi Bali sesuai dokumen DED. Ini dinilai sudah sangat urgent karena bangunan kantor dan wisma saat ini sudah tua, tidak bisa hanya mengandalkan pemeliharaan saja tapi harus dibongkar total dan ditambah kamar sesuai kebutuhan pegawai Pemprov Bali dan dibuat sekelas city hotel sehingga mampu menghadirkan kenyamanan lebih baik dan dengan demikian diharapkan mampu menarik pelanggan lebih banyak dan mencapai target pendapatan yang telah ditentukan. Namun penganggaran pembangunan wisma ditangguhkan di tahun 2020 maupun 2021 karena penganggarannya masih akan dikaji/ dianalisis lebih lanjut oleh Bappeda sesuai dengan prioritas Pemprov Bali apalagi di Tahun 2020 terdapat pandemik Covid 19 yang sangat mempengaruhi prioritas penganggaran Pemprov.
2. Untuk meningkatkan indeks kepuasan pelayanan promosi dan informasi kebudayaan dan pariwisata Bali juga sangat tergantung anggaran karena menyangkut dengan jumlah pagelaran dan pementasan-pementasan seni yang sanggup diselenggarakan oleh anjungan Daerah Bali. Karena dengan pagelaran seni tersebut sangat efektif untuk menarik kunjungan tamu ke anjungan Bali TMII.
3. Untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat melalui pembinaan yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung Provinsi Bali di Tahun 2020, kami hanya menyelenggarakan 1 (satu) kegiatan yaitu Seminar Pinandhita karena keterbatasan anggaran. Diharapkan di tahun-tahun mendatang anggaran akan diberikan lebih besar sehingga kami bisa menyelenggarakan pembinaan yang lebih variatif dan bermanfaat bagi masyarakat Bali di Jakarta.

3.7 REALISASI ANGGARAN

a. Pendapatan Daerah.

Pendapatan Daerah Badan Penghubung Provinsi Bali dalam Tahun Anggaran 2020 dengan target Rp. 121.800.000,- terealisasi sebesar Rp.49.650.000,- atau 41,03%. Seluruh pendapatan daerah tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2019 dimana targetnya Rp.

259.800.000,00 terealisasi sebesar Rp. 124.150.000 atau 47,79%. Terjadi penurunan penerimaan PAD yang signifikan hal ini disebabkan selain karena :

1. Ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas yang menyebutkan bahwa biaya penginapan diterapkan secara real cost dan ditetapkan besaran yang cukup besar di DPA sehingga banyak PNS lebih memilih penginapan/hotel yang memiliki fasilitas lebih nyaman dibandingkan wisma Badan Penghubung Bali
2. Adanya pandemik Covid 19 yang membuat berkurangnya tamu yang bepergian secara signifikan
3. Sudah tidak ada lagi penerimaan sewa kantin di tahun 2020, sewa kantin sudah tidak bisa lagi dipungut karena kantin di Anjungan Daerah Bali sudah dialihfungsikan menjadi etalasi barang-barang kesenian

Namun Badan Penghubung tetap berbenah agar tamu merasa nyaman dan aman dengan menampilkan suasana kental Bali yang eksotik di tengah Ibukota Jakarta. Penyebab lain juga adalah.

TABEL 8.
REALISASI PENDAPATAN

NO	URAIAN	TARGET ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
			Rp	%
1	Pendapatan Asli Daerah	121.000.000,00	49.650.000,00	41,03

b. Belanja Daerah

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran satuan kerja. Belanja daerah tahun 2020 dengan target anggaran BTL dan BL setelah perubahan sebesar Rp. 7.802.451.832,51,- realisasinya sebesar Rp., 7.518.627.643,- atau 96,36%. Bila dibandingkan Tahun 2019 dengan anggaran BTL dan BL sebesar Rp.9.278.814.511,- realisasinya sebesar Rp. 8.817.298.030,- atau 95,03%

penyerapan anggaran Tahun 2020 lebih baik dari Tahun 2019. Dengan rincian Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebagai berikut :

TABEL 9
REALISASI BELANJA DAERAH

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
			Rp	%
1	Belanja Tidak Langsung	4.454.913.688,51	4.292.879.888,00	96,36

Dengan rincian perbandingan Belanja Langsung per kegiatan yang menunjang pencapaian target sasaran strategis sebagai berikut :

TABEL 10
REALISASI BELANJA LANGSUNG

NO.	Kegiatan	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1.	Pengiriman jasa surat menyurat	5.000.000	4.999.840	99,99	5.000.000	4.991.000	99,80
2.	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	165.000.000	145.578.508	88,23	185.200.000	145.226.524	78,40
3.	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	79.000.000	77.510.675	98,11	73.400.000	65.658.675	89,40
4.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	781.877.068	764.635.088	97,79	799.492.632	797.162.444	99,70
5.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	325.871.280	325.871.275	99,99	369.667.912	368.982.088	99,80
6.	Penyediaan alat tulis kantor	15.000.000	15.000.000	100,00	9.977.600	9.977.600	100
7.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.000.000	19.999.500	99,99	3.289.900	3.289.900	100
8.	Penyediaan komponen alat listrik/ penerangan bangunan kantor	20.000.000	20.000.000	100,00	12.500.000	12.500.000	100

9.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan	5.000.000	4.945.100	98,90	5.000.000	5.000.000	100
10.	Penyediaan bahan logistik Kantor	-	-	-	5.000.000	5.000.000	100
11.	Penyediaan makanan dan minuman	315.500.000	315.305.000	99,94	5.600.000	5.600.000	100
12.	Rapat-rapat koordinasi konsultasi keluar dan dalam daerah	424.000.000	423.721.344	99,93	79.504.180	61.783.081	77,70
13.	Upacara keagamaan	75.000.000	75.000.000	100,00	75.000.000	75.000.000	100
14.	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	98.500.000	94.947.981	96,39	114.950.000	109.545.900	95,20
15.	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor	216.183.000	216.113.500	99,97	-	-	-
16.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	-	-	-	151.500.000	150.565.675	99,30
17.	Penyusunan perencanaan dan pelaporan capaian kinerja	5.950.000	5.950.000	100,00	8.199.800	8.199.800	100
18.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	94.300.000	87.344.000	92,62	18.100.000	18.090.000	99,90
19.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.	348.717.732	348.422.939	99,91	418.567.912	417.422.088	99,70
20.	Pagelaran seni budaya	675.500.000	675.489.641	99,99	-	-	-
21.	Pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya daerah	50.000.000	47.963.000	95,93	49.459.600	49.459.600	100
22.	Penyediaan barang/jasa dan kegiatan rutin pimpinan daerah	698.229.744	685.645.094	98,19	958.128.608	912.293.380	95,20
	JUMLAH	4.418.628.824	4.354.442.485	98,55	3.347.538.144	3.225.747.755	96,30

BAB IV

PENUTUP

Secara umum program kerja Badan Penghubung Provinsi Bali dalam Tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan baik dengan segala keterbatasan yang ada pada Badan Penghubung Provinsi Bali. Langkah-langkah konkret yang dilaksanakan di Tahun 2020 untuk lebih memaksimalkan pencapaian kinerja di tahun-tahun mendatang, yaitu :

1. Penambahan kegiatan pagelaran seni dan pembinaan-pembinaan masyarakat Bali di Jakarta baik secara offline maupun online sebagai sarana pengembangan seni, adat dan budaya Bali di Jakarta dengan sasaran meningkatnya kepuasan pengunjung Anjungan Bali TMII dan meningkatnya kepuasan masyarakat Bali di Jakarta atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung Provinsi Bali.
2. Untuk kendala yang paling mendasar dalam pelaksanaan aktivitas kegiatan di Badan Penghubung Provinsi Bali adalah keterbatasan kualitas pegawai/sumber daya manusia. Namun saat ini upaya-upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas SDM Badan Penghubung Provinsi Bali yaitu dengan lebih intensif mengikuti bimtek-bimtek atau pelatihan maupun workshop yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Provinsi Bali atau instansi lainnya agar pengetahuan SDM lebih luas dan dapat mendukung pencapaian organisasi. Selain itu solusi yang kami lakukan untuk mengisi kebutuhan SDM adalah dengan merekrut tenaga kontrak dengan kompetensi tertentu.
3. Mengupayakan pembangunan gedung kantor baru sesuai dengan dokumen perencanaan (DED) yang telah ada. Dengan adanya gedung kantor baru maka bisa meningkatkan pendapatan asli daerah dan juga meningkatkan kepuasan pelanggan wisma Badan Penghubung Provinsi Bali.









KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

NOMOR 050/ 02 /BPPROV

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
PADA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI
TAHUN 2019-2023

KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka penjabaran visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Badan Penghubung Provinsi Bali agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2019-2023;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali Tentang Rencana Strategis (Renstra) pada Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2019-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Strategis pada Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis merupakan acuan yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Penghubung Provinsi Bali untuk menetapkan rencana kinerja lima tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2019 – 2023.
- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dikoordinasikan oleh setiap pimpinan sub bagian/sub bidang dan disampaikan kepada Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Januari 2020

KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI BALI



IGUSTI NGURAH WIBAWA, S.Sos., MSi
PEMBINA

NIP. 19631215 198903 1 015

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar.
2. Inspektur Provinsi Bali di Denpasar.
3. Kepala BPKP Perwakilan Bali di Denpasar.
4. Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali, di Denpasar.
5. Kepala BPKAD Provinsi Bali di Denpasar
6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali di Denpasar.

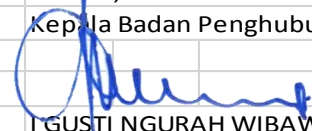
**RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI
TAHUN 2019-2023**

VISI : Terwujudnya kelancaran urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Bali di Ibu Kota Negara, Jakarta

MISI : (1) Meningkatkan kelancaran koordinasi hubungan antar lembaga (2) Mewujudkan pelayanan yang profesional untuk peningkatan pendapatan melalui Wisma Badan Penghubung Provinsi Bali (3) Mewujudkan promosi dan informasi di bidang ekonomi, sosial budaya, seni dan pariwisata di Jakarta (4) Meningkatkan pengembangan dan pembinaan seni, adat dan budaya Bali di Jakarta

Tujuan			Sasaran Stategis		Target					Strategi		Ket
Uraian	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Uraian	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Terwujudnya pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	1. Indeks kepuasan penerima pelayanan Hubungan Antar Lembaga 2. Indeks kepuasan peserta kegiatan terhadap pembinaan yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung Provinsi Bali 3. Indeks kepuasan pengunjung terhadap pelayanan di Anjungan Daerah Bali TMII 4. Indeks kepuasan pelanggan wisma Badan Penghubung Provinsi Bali	100	Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan penghubung Provinsi Bali	70	75	80	85	90	Meningkatkan kualitas pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali sesuai tupoksi	Program pelayanan komunikasi dan penyebarluasan informasi potensi daerah	

Jakarta, 31 Desember 2019
Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali


I GUSTI NGURAH WIBAWA, S.Sos., M.Si
PEMBINA
NIP. 19631215 198903 1 015

LAMPIRAN

PEMERINTAH PROVINSI BALI
RENJA TAHUN 2020 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021

Organisasi/SUB PD : 4.11.01.01 - Badan Penghubung

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				Induk	Perubahan	Induk	Perubahan	Meningkat / Menurun			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.11.	KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT					4.192.250.787,00	3.347.538.144,00	(-844.712.643,00)			4.557.798.440,00
4.11.4.11.01.01.01.	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja					2.476.075.882,00	2.339.949.936,00	(-136.125.946,00)			2.473.305.979,00
		Nilai evaluasi manajemen kinerja		80	80	2.476.075.882,00	2.339.949.936,00	(-136.125.946,00)		83	2.473.305.979,00
4.11.4.11.01.01.01.01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Masukan : Jumlah Dana	Jakarta			5.000.000,00	5.000.000,00	0,00			0,00
		Keluaran: Terkirimnya surat/dokumen ke alamat yang dituju		1 tahun	1 tahun					-	
		Hasil : Terlayannya jasa surat-menyurat		100 %	100 %						
4.11.4.11.01.01.01.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Masukan : Jumlah Dana	Jakarta			200.000.000,00	185.200.000,00	(-14.800.000,00)			0,00
		Keluaran: Terbayarnya biaya listrik dan		12 bulan	12 bulan					-	

		telepon tepat waktu								
		Hasil : Terlayannya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		100%	100%					
4.11.4.11.01.01.01.03.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Masukan : Jumlah Dana	Jakarta			356.082.046,00	369.667.912,00	13.585.866,00		0,00
		Keluaran: terwujudnya kebersihan kantor		12 bulan	12 bulan				-	
		Hasil : Terwujudnya kebersihan kantor		100%	100%					
4.11.4.11.01.01.01.04.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Masukan : Jumlah Dana	Jakarta			20.000.000,00	9.977.600,00	(-10.022.400,00)		0,00
		Keluaran: Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran		12 bulan	12 bulan				-	
		Hasil : Terwujudnya sarana penunjang untuk aktifitas administrasi kantor		100%	100%					
4.11.4.11.01.01.01.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Masukan : Jumlah Dana	Jakarta			20.000.000,00	3.289.900,00	(-16.710.100,00)		0,00
		Keluaran: tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang memadai		12 bulan	12 bulan				-	
		Hasil : terwujudnya pencetakan blanko		100%	100%					
4.11.4.11.01.01.01.06.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Masukan : Jumlah Dana	Jakarta			25.000.000,00	12.500.000,00	(-12.500.000,00)		0,00
		Keluaran: terwujudnya penerangan		1 tahun	1 tahun				-	

		gedung kantor yang baik								
		Hasil : Penerangan kantor menjadi baik		100%	100%					
4.11.4.11.01.01.01.07.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Masukan : Jumlah Dana	Jakarta			5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		5.000.000,00
		Keluaran: tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan yang mendukung kegiatan		1 tahun	1 tahun				1 tahun	
		Hasil : Tersedianya sumber informasi untuk menunjang aktifitas kantor		100%	100%					
4.11.4.11.01.01.01.08.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Masukan : Jumlah Dana	Jakarta			7.000.000,00	5.600.000,00	(-1.400.000,00)		16.500.000,00
		Keluaran: terpenuhi makanan dan minuman untuk rapat kegiatan kantor		12 bulan	12 bulan				12 bulan	
		Hasil : Lancarnya tugas-tugas Badan Penghubung Provinsi Bali		100%	100%					
4.11.4.11.01.01.01.09.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Masukan : Jumlah Dana	Jakarta			400.000.000,00	79.504.180,00	(-320.495.820,00)		400.000.000,00
		Keluaran: terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan lancar		12 bulan	12 bulan				12 bulan	
		Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas dinas		100%	100%					
4.11.4.11.01.01.01.10.	Upacara	Masukan :	Jakarta			75.000.000,00	75.000.000,00	0,00		108.796.662,00

	Keagamaan	Jumlah Dana Keluaran: terlaksananya upacara keagamaan yang mendukung kegiatan kantor Hasil : Tercapainya pelaksanaan upacara keagamaan untuk menunjang aktivitas kantor		12 bulan	12 bulan					12 bulan	
4.11.4.11.01.01.01.12.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Masukan : Jumlah Dana Keluaran: tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai Hasil : Terwujudnya sarana perlengkapan kantor yang berdaya guna	Jakarta			50.000.000,00	114.950.000,00	64.950.000,00			230.800.000,00
4.11.4.11.01.01.01.16.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Masukan : Jumlah Dana Keluaran: terpeliharanya gedung/kantor dengan baik Hasil : Terwujudnya Sarana Kantor yang Terawat	Jakarta			357.293.824,00	418.567.912,00	61.274.088,00		12 bulan	655.902.017,00
4.11.4.11.01.01.01.17.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Masukan : Jumlah Dana Keluaran: Jumlah tenaga pengemudi yang tersedia, Jumlah kendaraan dinas/operasional R2 dan R4 yang	Jakarta			778.000.012,00	799.492.632,00	21.492.620,00		1 tahun	881.997.300,00

		dipelihara secara optimal								
		Hasil : Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional secara optimal		100%	100%					
4.11.4.11.01.01.01.20.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Masukan : Jumlah Dana	Jakarta			89.300.000,00	18.100.000,00	(-71.200.000,00)		86.900.000,00
		Keluaran: peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang berdaya guna		12 bulan	12 bulan				12 bulan	
		Hasil : Terwujudnya peralatan dan perlengkapan kantor yang berdaya guna		100%	100%					
4.11.4.11.01.01.01.23.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Masukan : Jumlah Dana	Jakarta			0,00	151.500.000,00	151.500.000,00		0,00
		Keluaran: Akses disabilitas pada Anjungan Bali TMII Jakarta		1 paket	1 paket				0	
		Hasil : tersedianya akses bagi penyandang disabilitas		100%	100%					
4.11.4.11.01.01.01.24.	Penyusunan, Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	Masukan : Jumlah Dana	Jakarta			10.000.000,00	8.199.800,00	(-1.800.200,00)		10.010.000,00
		Keluaran: dokumen perencanaan yang memadai		1 tahun	1 tahun				1 tahun	
		Hasil : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja		3 Dokumen	3 Dokumen					
4.11.4.11.01.01.01.50.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Masukan : Jumlah Dana	Jakarta			5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		0,00
		Keluaran: tersedianya		1 tahun	1 tahun				1 tahun	

		tabung pemadam yang siap pakai								
		Hasil : Terwujudnya bahan logistik kantor yang siap pakai		100%	100%					
4.11.4.11.01.01.01.55.	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Masukan : Jumlah Dana	Jakarta			73.400.000,00	73.400.000,00	0,00		77.400.000,00
		Keluaran: terbayarnya PBB dan iuran lainnya dengan tepat waktu		1 tahun	1 tahun				1 tahun	
		Hasil : Pembayaran PBB dan iuran tepat waktu		100%	100%					
4.11.4.11.01.01.02.	Program Pelayanan Komunikasi dan Penyebarluasan Informasi Potensi Daerah					1.716.174.905,00	1.007.588.208,00	(-708.586.697,00)		2.084.492.461,00
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali		75	75	1.716.174.905,00	1.007.588.208,00	(-708.586.697,00)	80	2.084.492.461,00
4.11.4.11.01.01.02.01.	Kegiatan Pagelaran Seni budaya	Masukan : Jumlah Dana	Jakarta			332.106.000,00	0,00	(-332.106.000,00)		568.369.705,00
		Keluaran: terselenggaranya promosi kebudayaan Bali		1 kali	-				8 kali	
		Hasil : Persentase peningkatan informasi kebudayaan Bali yang diterima oleh pengunjung		100%	100%					
4.11.4.11.01.01.02.02.	Kegiatan Pelestarian dan	Masukan : Jumlah Dana	Jakarta			120.206.451,00	49.459.600,00	(-70.746.851,00)		228.443.951,00

	Pengembangan Adat dan Budaya	Keluaran: terlaksananya kegiatan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta		100 Orang	50 Orang					100 Orang	
		Hasil : Persentase masyarakat Bali di Jakarta yang terbina dengan baik		100%	100%						
4.11.4.11.01.01.02.03.	Kegiatan Penyediaan Barang/Jasa dan Kegiatan Rutin Pimpinan Daerah	Masukan : Jumlah Dana	Jakarta			1.263.862.454,00	958.128.608,00	(-305.733.846,00)			1.287.678.805,00
		Keluaran: terlaksananya kegiatan rutin pimpinan dengan lancar		1 tahun	1 tahun					1 tahun	
		Hasil : Persentase kelancaran kegiatan rutin pimpinan daerah		100%	100%						
	TOTAL					4.192.250.787,00	3.347.538.144,00	(-844.712.643,00)			4.557.798.440,00

DENPASAR, 30-07-2020

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

TAHUN 2020

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

PROGRAM	KEGIATAN				REALISASI	% PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN	KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8
program peningkatan akuntabilitas capaian kinerja	1. Penyediaan jasa surat menyurat	Input: Dana	Rupiah	5.000.000	4.991.000	99,80	
		Output: Terlaksananya pengiriman jasa surat menyurat	Bulan	12	12	12	
		Outcome: Terkirimnya Surat menyurat sampai di alamat yang dituju	Bulan	12	12	12	
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input: Dana	Rupiah	185.200.000	145.226.524	78,40	
		Output: Terbayarnya biaya telepon dan listrik	Bulan	12	12	12	
		Outcome: Pembayaran penggunaan telepon dan listrik berjalan lancar	Bulan	12	12	12	
	3. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Input: Dana	Rupiah	73.400.000	65.658.675	89,40	
		Output: Tersedianya pembayaran iuran dan sumbangan lainnya.	Bulan	12	12	12	
		Outcome: Pembayaran iuran dan sumbangan lainnya tepat waktu.	Bulan	12	12	12	

	4. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	Input : Dana Output : Tersedianya jasa service dan penggantian suku cadang dan perizinan Outcome : Kendaraan dinas yang siap pakai	Rupiah Unit Unit	799.492.632 13 13	797.162.444 13 13	99,70 13 13	
	5. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input: Dana Output: Tersedianya bahan/ alat kebersihan kantor Tenaga cleaning service Outcome: Terwujudnya kebersihan kantor	Rupiah Bulan Orang Bulan	369.667.912 12 6 12	368.982.088 12 6 12	99,80 12 6 12	
	6. Penyediaan alat tulis kantor	Input: Dana Output: Tersedianya sarana alat-alat tulis kantor. Outcome: Terwujudnya ketersediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kegiatan administrasi kantor	Rupiah Bulan Bulan	9.977.600 12 12	9.977.600 12 12	100,00 12 12	
	7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input: Dana Output: Terlaksananya pencetakan blangko Outcome: Terwujudnya ketersediaan blangko untuk mendukung kelancaran kegiatan administrasi kantor	Rupiah Bulan Bulan	3.289.900 12 12	3.289.900 12 12	100,00 12 12	
	8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input: Dana Output: Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor Outcome: Penerangan kantor menjadi baik	Rupiah Bulan Bulan	12.500.000 12 12	12.500.000 12 12	100,00 12 12	

	9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input: Dana Output: Tersedianya surat khabar dan majalah Outcome: Tersedianya sumber informasi untuk menunjang aktivitas kantor	Rupiah Bulan Bulan	5.000.000 12 12	5.000.000 12 12	100.00 12 12	
	10. Penyediaan bahan logistik kantor	Input: Dana Output: Tersedianya APAR Outcome: Terwujudnya ketersediaan APAR untuk menunjang keamanan kantor	Rupiah Unit Unit	5.000.000 23 23	5.000.000 23 23	100,00 23 23	
	11. Penyediaan makanan dan minuman	Input: Dana Output: Tersedianya makanan dan minuman untuk peserta rapat atau tamu Badan Penghubung Outcome: Terwujudnya pelayanan yang optimal untuk peserta rapat atau tamu Badan Penghubung	Rupiah Bulan Bulan	5.600.000 12 12	5.600.000 12 12	100,00 12 12	
	12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	Input: Dana Output: Terlaksananya perjalanan dinas untuk rapat koordinasi dan Konsultasi Outcome: Koordinasi dan konsultasi yang mendukung kegiatan kantor menjadi lancar	Rupiah Bulan Bulan	79.504.180 12 12	61.783.081 12 12	77,70 12 12	
	13. Upacara keagamaan	Input: Dana Output: Terlaksananya upacara keagamaan sehari-hari Outcome: Tercapainya pelaksanaan upacara	Rupiah Bulan Bulan	75.000.000 12 12	75.000.000 12 12	100,00 12 12	

		keagamaan untuk menunjang aktivitas kantor					
	14. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Input : Dana Output : Terselenggaranya Penyediaan barang sesuai kebutuhan kantor Outcome : Terpenuhi kebutuhan barang yang dapat menunjang kegiatan aktivitas kantor	Rupiah Bulan Bulan	114.950.000 12 12	109.545.900 12 12	95,20 12 12	
	15. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Input: Dana Output: Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Outcome: Terwujudnya gedung kantor yang berdaya guna	Rupiah Bulan Bulan	418.567.912 12 12	417.422.088 12 12	99,70 12 12	
	16. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Input : Dana Output : Terlaksananya pemeliharaan Sarana kantor Outcome : Terwujudnya sarana kantor yang terawat	Rupiah Bulan Bulan	18.100.000 12 12	18.090.000 12 12	99,90 12 12	
	17. Penyusunan perencanaan dan pelaporan capaian kinerja	Input : Dana Output : Tersedianya dokumen perencanaan Outcome : Terwujudnya dokumen perencanaan yang memadai dan sesuai ketentuan yang berlaku	Rupiah dokumen dokumen	8.199.800 12 12	8.199.800 12 12	100,00 12 12	
	18. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Input: Dana Output: Tersedianya akses disabilitas di Anjungan Bali TMII Outcome: Terwujudnya Akses disabilitas yang berdaya guna di Anjungan Bali TMII	Rupiah paket paket	151.500.000 1 1	150.565.675 1 1	99,30 1 1	
program pelayanan komunikasi dan	19. Pagelaran seni budaya	Input: Dana Output:	Rupiah	-	-	-	

penyebarluasan informasi potensi daerah		Terlaksananya pagelaran seni budaya dan pameran makanan Outcome: Terwujudnya promosi dan informasi melalui Anjungan Bali TMII	kali kali	1 1	1 1	1 1	
	20. Pelestarian dan pengembangan adat dan budaya	Input: Dana Output: Terlaksananya seminar pinandhita Outcome: Terwujudnya peningkatan pemahaman para pinandhita di DKI Jakarta	Rupiah orang orang	49.459.600 50 50	49.459.600 50 50	100,00 50 50	
	21. Penyediaan barang/jasa dan kegiatan rutin pimpinan daerah	Input : Dana Output : Terselenggaranya Penyediaan barang/jasa dan operasionaln kepala daerah Outcome : Terpenuhi kebutuhan barang/jasa pimpinan	Rupiah Bulan Bulan	958.128.608 12 12	912.293.380 12 12	95,20 12 12	

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

2020

SKPD : BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

SASARAN	INDIKATOR PENCAPAIAN SASARAN	TARGET	REALISASI	%PENCAPAIAN TARGET	KET
Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali : 1. Indeks kepuasan penerima pelayanan Hubungan Antar Lembaga 2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pembinaan masyarakat Bali di Jakarta melalui Badan Penghubung 3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan promosi dan informasi di Anjungan Daerah Bali di Jakarta 4. Indeks kepuasan pelanggan tamu wisma di Badan Penghubung Provinsi Bali	75	85,96	114,60%	



KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

NOMOR 050/ 01 /BPPROV

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali Tentang Indikator Kinerja Utama pada Badan Penghubung Provinsi Bali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturanm Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 1
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda No 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Penghubung Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Penghubung Provinsi Bali untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2019 – 2023.
- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dikoordinasikan oleh setiap pimpinan bagian/bidang dan disampaikan kepada Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Januari 2020



KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI BALI

I Gusni Ngurah Wibawa, S.Sos., M.Si

Pembina

NIP. 19631215 198903 1 015

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar.
2. Inspektur Provinsi Bali di Denpasar.
3. Kepala BPKP Perwakilan Bali di Denpasar.
4. Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali, di Denpasar.
5. Kepala BPKAD Provinsi Bali di Denpasar
6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali di Denpasar (3 exemplar).

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI
PERIODE 2019-2023**

Tugas Pokok Badan Penghubung Provinsi Bali adalah :
Membantu Gubernur Bali dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Ibu Kota Negara.
Fungsi Badan Penghubung Provinsi Bali adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis dan pelayanan penunjang sesuai dengan tugas Badan
2. Pengelolaan pelaksanaan tugas sesuai dengan tupoksi Badan
3. Pelaksanaan urusan Tata Usaha

Sasaran strategis	Indikator kinerja utama	Penjelasan (alasan)	Penanggungjawab	Sumber data	keterangan
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan koordinasi hubungan antar lembaga 2. Pelayanan pembinaan umat/masyarakat Bali di Jakarta melalui kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya 3. Pelayanan promosi dan informasi melalui berbagai pagelaran seni budaya di Anjungan Daerah Bali di Jakarta 4. Pelayanan terhadap pimpinan (protokoler) dan tamu wisma di Badan Penghubung Provinsi Bali 	<p>Subbid Hubungan Antar Lembaga</p> <p>Subbid Promosi dan Informasi</p> <p>Subbid Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan</p>	Survey Kepuasan Masyarakat pada Badan Penghubung Provinsi Bali dan Anjungan Daerah Bali TMII, sesuai Permenpan No 14 Tahun 2017	Program pelayanan komunikasi dan penyebaran informasi potensi daerah

Jakarta, 31 Desember 2019

Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali



I GUSTI NGURAH WIBAWA, S.Sos.,M.Si

PEMBINA

NIP. 19631215 198903 1 015



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I GUSTI NGURAH WIBAWA, S.Sos., M.Si
Jabatan : KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WAYAN KOSTER
Jabatan : GUBERNUR BALI
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 8 Januari 2020

Pihak Kedua,
GUBERNUR BALI

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI BALI


WAYAN KOSTER

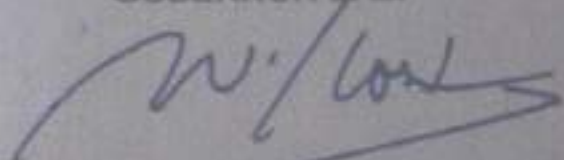

I GUSTI NGURAH WIBAWA, S.SOS, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan penghubung Provinsi Bali	80

Program	Anggaran (Rp)
1. Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	2.475.075.882,-
2. Pelayanan Komunikasi dan Penyebarluasan Informasi Potensi Daerah	1.488.882.454,-

GUBERNUR BALI



WAYAN KOSTER

Jakarta, 6 Januari 2020

KERUANGAN PENGHUBUNG
PROVINSI BALI



GUSTI NGURAH WIBAWA, S.Sos., M.S.

PEMBAWA I
NIP. 19831215 198903 1 015



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I GUSTI NGURAH WIBAWA
Jabatan : KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WAYAN KOSTER
Jabatan : GUBERNUR BALI
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 4 Januari 2021

Pihak Kedua,
GUBERNUR BALI

WAYAN KOSTER

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN

I GUSTI NGURAH WIBAWA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan penghubung Provinsi Bali	80

Program	Anggaran (Rp)
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	7.094.285.165,-
2. Pelayanan Penghubung	1.152.545.900,-

GUBERNUR BALI

WAYAN KOSTER



Jakarta, 4 Januari 2021
KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI BALI

I GUSTI NGURAH WIBAWA
NIP. 19631215 198903 1 015